



TEMUAN KAMAR MEWAH DI LAPAS CIBINONG, SIAPA DIUNTUNGKAN?

Di balik tembok Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, ada hunian yang jauh dari gambaran sel penjara. Ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga perlengkapan memasak tersedia di dalamnya. Ombudsman Republik Indonesia menyebut fasilitas itu berstandar seperti apartemen. Lebih dari 10 bangunan serupa ditemukan di kawasan yang terpisah dari blok hunian warga binaan. Ironisnya, Ombudsman sempat kesulitan masuk ke kawasan tersebut. Dalam kunjungan pertama pada Juli 2026, tim disebut tidak diperbolehkan masuk. Saat kembali pada 23 September, akses dihalangi meski membawa surat resmi. Bahkan sempat terjadi cekcok dan aksi saling dorong dengan petugas. Setelah berhasil masuk, Ombudsman mendapat keterangan bahwa salah seorang penghuni membayar untuk menempati hunian tersebut. Dugaan komersialisasi pun mencuat, meski penerima dan nominal tarid belum diketahui. Ombudsman meminta fasilitas khusus itu dibongkar, warga binaan yang menempatinnya dikembalikan ke blok, serta jajaran pengelola Lapas Cibinong dievaluasi. Namun, Ditjenpas membantah jika kawasan tersebut disebut sebagai apartemen narapidana. Mereka menyatakan lokasi itu merupakan kawasan asimilasi yang di dalamnya terdapat rumah dinas jabatan. Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta persoalan dibuka dan diperiksa secara tuntas. Jika terbukti ada pejabat atau petugas yang mengomersialkan fasilitas bagi narapidana, ia menyatakan sanksi harus diberikan. Senada, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad juga meminta Komisi XIII mendalami temuan Ombudsman melalui fungsi pengawasan. Pertanyaannya kini bukan sekadar mengapa ada kamar mewah di dalam lapas? Tetapi siapa yang mengizinkan? Siapa yang menikmati? Dan siapa yang diuntungkan? BACA HAL 11...

HASIL TEMUAN OMBUDSMAN RI DI LAPAS KELAS IIA CIBINONG

Hunian Eksklusif

Ditemukan lebih dari 10 bangunan berbentuk rumah/homestay yang terpisah dari blok hunian reguler. Terdiri dari 3 tipe kamar, bahkan ada unit dengan 4 kamar tidur.

Fasilitas Mewah

Kamar dilengkapi AC, sofa, TV besar, kulkas dua pintu, meja makan, dapur, serta kamar mandi pribadi dengan toilet duduk.

Fasilitas Rekreasi

Tersedia gym, kolam, dan simulator golf yang masih dalam pembangunan.

Diduga Berbayar

Sekitar 6-7 warga binaan ditemukan menghuni kawasan tersebut. Salah satunya mengaku membayar uang untuk menempati hunian eksklusif.

Keamanan Lemah

Ombudsman menemukan akses keluar-masuk langsung dari belakang lapas yang dinilai membuka celah penyalahgunaan.

Februari 2026

- Kapasitas Ideal Hunian: 146.860 orang
- Total Jumlah Penghuni: 272.671 orang
- Persentase Over Kapasitas: ~85,6%

Maret 2026

- Kapasitas Ideal Hunian: 146.860 orang
- Total Jumlah Penghuni: 271.468 orang
- Persentase Over Kapasitas: ~84,8%

Mei 2026

- Kapasitas Ideal Hunian: 147.376 orang
- Total Jumlah Penghuni: 271.602 orang
- Persentase Over Kapasitas: ~84,2%

Update Terbaru 2026

- Kapasitas Ideal Hunian: 152.514 orang
- Total Jumlah Penghuni: 274.761 orang
- Persentase Over Kapasitas: ~80,1%

DATA KAPASITAS VS PENGHUNI NASIONAL 2026





WAMENAG SOROTI BEBAS BERSYARAT BECHI, MINTA PESANTREN DIEVALUASI

JAKARTA — Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii menyoroti pembebasan bersyarat Moch. Subchi Azal Tsani alias Bechi, terpidana kasus kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, Jawa Timur. Syafii meminta Direktorat Jenderal Pesantren Kementerian Agama mengevaluasi kembali status kelembagaan dan penyelenggaraan pesantren tempat perkara tersebut terjadi. Syafii menyayangkan pemberian pembebasan bersyarat kepada Bechi. Ia menegaskan kekerasan seksual di lingkungan pesantren tidak boleh mendapatkan toleransi.

Setiap pelaku, kata dia, harus diproses sesuai hukum dan dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya menyayangkan pembebasan bersyarat tersebut. Saya akan segera menghubungi dan berkoordinasi dengan Kementerian yang memiliki kewenangan di bidang pemyarakatan untuk mendapatkan penjelasan mengenai proses dan dasar pemberian pembebasan bersyarat tersebut,” ujar Syafii di Jakarta, Kamis

(24/9/2026).

Menurut Syafii, pembebasan bersyarat merupakan mekanisme dalam sistem pemyarakatan dan bukan pembebasan murni. Kemenag tidak memiliki kewenangan untuk memberikan, membatalkan, maupun mencabut pembebasan bersyarat. Kewenangan tersebut berada pada otoritas pemyarakatan.

Meski demikian, Kemenag memiliki kepentingan memastikan pesantren memenuhi ketentuan yang berlaku serta menjamin perlindungan dan keselamatan santri. Syafii menegaskan penanganan perkara kekerasan seksual tidak boleh berhenti setelah pelaku menjalani proses hukum.

“Penanganan kekerasan seksual tidak boleh berhenti pada proses hukum terhadap pelaku. Negara harus memastikan korban terlindungi dan santri mendapatkan jaminan keamanan. Tidak ada kompromi terhadap kekerasan seksual,” katanya.

Atas dasar itu, Syafii meminta Ditjen Pesantren melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap pesantren di Jombang tersebut. Pemeriksaan

mencakup status terdaftar pesantren, Nomor Statistik Pesantren, badan hukum penyelenggara, izin pendirian dan penyelenggaraan, serta pemenuhan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren dan regulasi pelaksanaannya.

Evaluasi juga diarahkan pada sistem pencegahan dan penanganan kekerasan, mekanisme pengaduan, serta tata kelola perlindungan santri. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam aspek yang menjadi kewenangan Kemenag, langkah akan diambil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pengecekan ini bukan untuk menghakimi lembaga. Kita ingin memastikan bahwa setelah adanya perkara serius tersebut, status kelembagaan, tata kelola, dan sistem perlindungan santri saat ini benar-benar memenuhi ketentuan dan mampu menjamin keselamatan santri,” ujar Syafii.

Ia menekankan pesantren seharusnya menjadi ruang pendidikan dan pembinaan akhlak yang aman bagi

santri, baik secara fisik maupun psikologis. Menurut dia, otoritas keagamaan juga tidak boleh menjadi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah akan menginvestigasi proses pembebasan bersyarat Bechi. Investigasi dilakukan dengan mempertimbangkan masukan masyarakat, termasuk kekhawatiran korban dan keluarga korban.

Yusril mengatakan sistem pemyarakatan tidak hanya menyangkut pemenuhan hak narapidana. Kepentingan korban, keluarga korban, dan masyarakat juga harus menjadi pertimbangan.

“Kami harus memberikan pertimbangan tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban, bagi masyarakat yang merasa tercederai dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan di masa yang lalu,” kata Yusril di Jakarta, Kamis (24/9/2026). wid,ist/dya)

SUBSIDI ENERGI 2027 DIPANGKAS RP11,4 T, JATAH LPG 3 KG IKUT TURUN

Alokasi dana subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dipangkas Rp11,44 triliun. Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati subsidi energi tahun depan menjadi Rp261,5 triliun dari usulan awal Rp272,94 triliun. Pemangkasan terutama menyasar subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram. Sementara subsidi listrik tidak berubah secara keseluruhan. Kesepakatan tersebut ditetapkan Banggar bersama pemerintah dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).



Pekerja menata tabung gas elpiji 3 kg untuk dijual kembali di kawasan Jakarta. (Dok.ist)

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan angka tersebut merupakan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan.

"Alokasi subsidi energi sebesar Rp261.502,2 miliar, lebih rendah Rp11.443,2 miliar dari usulan RAPBN 2027, sebesar Rp272.945,3 miliar," kata Said dalam rapat kerja bersama pemerintah, Kamis (24/9/2026).

Dari total pemangkasan Rp11,44 triliun, sebagian besar berasal dari subsidi BBM dan LPG 3 kg. Alokasi untuk kedua komoditas tersebut turun dari Rp142,84 triliun menjadi Rp131,39 triliun.

Di dalamnya terdapat subsidi Jenis BBM Tertentu (JBT) sekitar Rp28,34 triliun dan subsidi LPG 3 kg sebesar Rp103,05 triliun. Dengan demikian, pemangkasan terbesar terjadi pada subsidi LPG 3 kg, yang berkurang sekitar Rp11,09 triliun dari pagu awal Rp114,14 triliun.

Volume penyaluran juga ikut disesuaikan. Kuota BBM bersubsidi ditetapkan 19,561 juta kiloliter, terdiri atas minyak tanah 561 ribu kiloliter dan minyak solar 19 juta kiloliter.

Untuk LPG 3 kg, volume subsidi ditetapkan 8 juta metrik ton. Angka tersebut turun dari rencana awal dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2027 sebesar sekitar 8,94 juta ton.

Penyesuaian volume ini membuat

pemangkasan subsidi tidak sekadar terjadi pada angka anggaran. Ruang penyaluran BBM dan LPG bersubsidi juga menjadi lebih kecil dibandingkan rancangan awal pemerintah.

Subsidi Listrik Tak Berubah

Berbeda dengan BBM dan LPG, subsidi listrik tetap dipertahankan. Alokasinya sekitar Rp130,1 triliun.

Dalam rincian Banggar, subsidi listrik tahun berjalan mencapai Rp117,84 triliun, sementara kurang bayar subsidi listrik 2025 dialokasikan Rp12,26 triliun. Subsidi tetap solar juga ditetapkan Rp1.000 per liter.

Dengan demikian, struktur subsidi energi 2027 memperlihatkan pergeseran yang cukup jelas: penghematan anggaran terkonsentrasi pada BBM dan LPG 3 kg, sedangkan subsidi listrik dipertahankan.

Pemangkasan tersebut tidak bisa dilepaskan dari asumsi ekonomi yang digunakan pemerintah dan DPR untuk menyusun RAPBN 2027.

Dalam kesepakatan terbaru, harga minyak mentah Indonesia atau ICP diasumsikan US\$75 per barel. Nilai tukar rupiah dipatok Rp17.500 per dolar AS. Kedua asumsi tersebut menjadi salah satu dasar perhitungan kebutuhan subsidi energi tahun depan.

Sebelumnya, pemerintah juga menjelaskan bahwa efisiensi subsidi

energi berkaitan dengan penyesuaian volume penyaluran serta upaya membuat subsidi lebih tepat sasaran. Pembahasan efisiensi juga mencakup BBM tertentu seperti Pertalite.

Namun, pemangkasan subsidi membawa konsekuensi yang perlu diperhatikan. Penurunan kuota, terutama LPG 3 kg, membuat akurasi penyaluran menjadi semakin penting agar penghematan anggaran tidak berubah menjadi persoalan pasokan maupun akses bagi masyarakat yang memang berhak menerima subsidi.

Meski dipangkas Rp11,44 triliun, subsidi energi tetap menjadi pos anggaran yang besar. Bahkan, berdasarkan rancangan awal pemerintah, pagu subsidi energi

2027 sebenarnya meningkat dibandingkan outlook APBN 2026 yang sekitar Rp227,3 triliun. Setelah pembahasan Banggar, angka tersebut menjadi Rp261,5 triliun.

Pemangkasan subsidi energi tersebut menjadi bagian dari kesepakatan lebih besar mengenai postur RAPBN 2027.

Banggar DPR dan pemerintah menyepakati pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun. Sementara belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran dipatok Rp671,16 triliun atau 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pertumbuhan ekonomi 2027 ditargetkan 6 persen. Asumsi lainnya mencakup inflasi 2,5 persen, tingkat bunga Surat Berharga Negara (SBN) 6,9 persen, ICP US\$75 per barel, dan lifting minyak bumi 612,5 ribu barel per hari.

Pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan Rp2.911,95 triliun, termasuk penerimaan pajak Rp2.593,35 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp318,6 triliun.

Pemerintah juga memasang target sosial-ekonomi. Tingkat kemiskinan ditargetkan 6-6,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,3-4,87 persen, serta penciptaan lapangan kerja baru 2,57 juta hingga 3,49 juta orang. (gus,ist,kum/dya)

VONIS BANDING NADIEM: DIPANGKAS JADI 9 TAHUN BUI, UANG PENGGANTI TURUN RP260 M

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memangkas hukuman mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook. Tak hanya masa pidana penjara yang berkurang dari 10 tahun menjadi sembilan tahun, kewajiban membayar uang pengganti juga dipotong sekitar Rp260 miliar.

Dalam sidang putusan banding di PT Jakarta, Kamis (24/9/2026), hakim menetapkan Nadiem membayar uang pengganti sebesar Rp548.761.031.950,86. Pada putusan tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat membebaskan uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar. Dengan demikian, kewajiban Nadiem berkurang sekitar Rp260,83 miliar.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 tahun dan pidana denda sejumlah Rp1 miliar," kata Ketua Majelis Hakim PT Jakarta, Subachran Hardi Mulyono, saat membacakan amar putusan.

Nadiem juga tetap dikenai denda Rp1 miliar. Jika denda tidak dibayar, pidana tersebut diganti dengan 140 hari penjara. Sementara untuk uang pengganti, apabila tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta benda Nadiem dapat disita dan dilelang. Jika hasilnya tidak mencukupi, kewajiban tersebut diganti dengan pidana penjara selama enam tahun.

Meski besaran uang pengganti berubah, majelis hakim banding tetap menyatakan Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Hakim juga mempertahankan kesimpulan bahwa perkara pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) menimbulkan kerugian keuangan negara sekitar Rp1,56 triliun. Angka tersebut sebelumnya dihitung berdasarkan audit BPKP.

Perubahan uang pengganti dalam putusan banding berkaitan dengan pembebanan kerugian secara proporsional kepada pihak-pihak yang dinilai memperoleh manfaat dari tindak pidana. Dalam pemberitaan mengenai amar putusan, Nadiem dibebaskan bagian tertentu dari total kerugian negara, sementara majelis juga mengatur pembebanan kepada pihak lain.

Putusan banding sekaligus mempertahankan substansi putusan tingkat pertama bahwa Nadiem bertanggung jawab secara pidana dalam perkara tersebut. Pada 30 Juni 2026, Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat sebelumnya menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 190 hari, serta uang pengganti Rp809,59 miliar



subsider lima tahun penjara.

Vonis tingkat pertama itu jauh lebih rendah daripada tuntutan jaksa. Penuntut umum sebelumnya meminta Nadiem dihukum 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar, serta membayar uang pengganti Rp5,6 triliun. Dalam perkara tersebut, jaksa mendalilkan adanya penyalahgunaan kewenangan dalam pengadaan Chromebook dan Chrome OS pada program digitalisasi pendidikan.

Sejak awal persidangan, Nadiem membantah tuduhan tersebut. Dalam pembelaannya, ia menyatakan tidak ada kerugian negara, konflik kepentingan, maupun aliran dana kepadanya. Ia juga berpendapat penggunaan Chrome OS justru menghemat anggaran negara sekitar Rp3,9 triliun dibandingkan jika seluruh perangkat menggunakan sistem operasi Windows.

Nadiem juga menegaskan dirinya tidak pernah menandatangani dokumen pengadaan laptop Chromebook. Menurut dia, keputusan teknis mengenai penggunaan Chrome OS berada pada tim teknis kementerian. Pernyataan tersebut menjadi bagian dari pembelaan yang kemudian diperdebatkan jaksa dan majelis hakim dalam persidangan tingkat pertama.

Perkara ini bermula dari pengadaan laptop Chromebook dan CDM dalam program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek. Kejaksaan menyatakan proyek tersebut menimbulkan kerugian negara sekitar Rp1,56 triliun. Dalam proses persidangan, jaksa juga mempersoalkan kesesuaian perangkat dengan kebutuhan sekolah serta hubungan bisnis dan investasi antara perusahaan yang pernah berkaitan dengan Nadiem dan Google.

Di sisi lain, putusan tingkat

pertama sempat diwarnai dissenting opinion. Salah satu hakim berpendapat Nadiem semestinya dibebaskan karena bukti yang diajukan jaksa dinilai belum cukup kuat untuk membuktikan seluruh unsur pidana. Mahkamah Agung melalui kanal informasinya mencatat adanya perbedaan pendapat tersebut dalam vonis 30 Juni.

Setelah putusan banding dibacakan, Nadiem menyatakan akan menempuh upaya hukum kasasi. Ia tetap mempertahankan pandangan bahwa tidak terdapat kerugian negara, aliran dana, maupun konflik kepentingan yang melibatkan dirinya.

Kejaksaan Agung sementara itu belum menentukan langkah hukum. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan pihaknya menghormati putusan PT Jakarta dan akan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum menentukan sikap sesuai batas waktu yang tersedia bagi jaksa penuntut umum.

Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menilai Nadiem Anwar Makarim tidak bersalah dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook. Tom Lembong menyebut persoalan tersebut semestinya dilihat dari aspek pembuktian hukum, bukan dari penilaian terhadap kebijakan Nadiem selama menjabat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

"Ini masalah salah atau tidak bersalah, bukan suka atau tidak suka, bukan masalah populer atau tidak populer, juga bukan masalah setuju atau tidak setuju dengan kebijakan Pak Nadiem, tetapi ini murni masalah keadilan seseorang yang memang tidak bersalah atas hal-hal yang dituduhkan," kata Tom di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Kamis (24/9/2026).

PERUBAHAN DOKUMEN HUKUM & HUKUMAN (VONIS PN VS. PT)

Hukuman Penjara

- Putusan PN Jakarta Pusat (30 Juni 2026): 10 Tahun
- Putusan Banding PT DKI Jakarta (24 September 2026): 9 Tahun (Berkurang 1 tahun)

Denda

- Putusan PN Jakarta Pusat (30 Juni 2026): Rp1 Miliar
- Putusan Banding PT DKI Jakarta (24 September 2026): Rp1 Miliar

Subsider Denda

- Putusan PN Jakarta Pusat (30 Juni 2026): 190 Hari kurungan
- Putusan Banding PT DKI Jakarta (24 September 2026): 140 Hari kurungan (Berkurang 50 hari)

Uang Pengganti

- Putusan PN Jakarta Pusat (30 Juni 2026): Rp809,59 Miliar
- Putusan Banding PT DKI Jakarta (24 September 2026): Rp548,76 Miliar (Berkurang sekitar Rp260,8 Miliar)

Subsider Uang Pengganti

- Putusan PN Jakarta Pusat (30 Juni 2026): 5 Tahun penjara
- Putusan Banding PT DKI Jakarta (24 September 2026): 6 Tahun penjara (Bertambah 1 tahun)



Tom mengatakan, fakta mengenai perkara tersebut telah terungkap dalam persidangan, baik di tingkat pertama maupun saat proses banding. Karena itu, menurut dia, fokus perkara bukan pada apakah publik menyukai atau menolak kebijakan Nadiem, melainkan apakah mantan Mendikbudristek itu terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Ia mengakui kebijakan Nadiem selama menjabat pada 2019-2024 tidak selalu diterima semua kalangan. Sejumlah kebijakan bahkan menuai pro dan kontra. Namun, Tom menilai perdebatan mengenai kebijakan harus dipisahkan dari persoalan pidana. (wid,ist,ant/dya)

INOVASI SAT POL PP KABUPATEN BLITAR GANDENG KAKANDA BERANTAS PEREDARAN ROKOK ILEGAL

BLITAR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Blitar terus berupaya memberantas peredaran rokok ilegal, melalui berbagai langkah penegakan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat.

Salah satu inovasi yang kini dikembangkan adalah menggandeng Kakanda (Kader Penegak Perda), untuk memperluas jangkauan edukasi dan pengawasan di tingkat masyarakat.

Kepala Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibum) Satpol PP Kabupaten Blitar, Hangga Puja Sukmana mengatakan bahwa program pemberantasan rokok ilegal didukung Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

Menurut Hangga, sejak Mei 2026 pelaksanaan kegiatan penegakan hukum dilakukan melalui Operasi Gabungan (Opsgab) yang melibatkan Satpol PP Kabupaten Blitar, Bea Cukai, dan Sub Denpom. Hingga sejak Mei hingga September 2026, Opsgab telah dilaksanakan sebanyak enam kali.

“Target operasi gabungan minimal 12 kali dalam setahun. Secara keseluruhan, mulai Januari hingga September sudah dilakukan 20 kali operasi dari target 30 kali dalam setahun,” ujarnya.

Selain menegakan hukum, Satpol PP juga aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Hingga September 2026, kegiatan sosialisasi



Operasi gabungan pemberantasan rokok ilegal oleh Sat Pol PP Kabupaten Blitar, Bea Cukai Blitar dan Denpom.

tatap muka telah dilaksanakan sebanyak empat kali dari target enam kali dalam setahun.

Peserta sosialisasi berasal dari berbagai kalangan, mulai tokoh agama (toga), tokoh masyarakat (tomas), perangkat desa, pedagang hingga petani tembakau di wilayah penghasil tembakau. Setiap kegiatan sosialisasi rata-rata diikuti sekitar 50 peserta.

“Anggaran DBHCHT dibagi 40 persen untuk kegiatan sosialisasi dan 60 persen untuk penegakan hukum melalui operasi gabungan,” jelas Hangga.

Ia menambahkan, kegiatan tersebut bertujuan membantu dan memfasilitasi penertiban peredaran rokok ilegal maupun hasil tembakau ilegal di Kabupaten Blitar.

Berdasarkan hasil pemetaan, dari 22 kecamatan di Kabupaten Blitar terdapat sekitar 16 hingga 17 kecamatan yang tergolong rawan peredaran rokok ilegal. Wilayah yang menjadi perhatian di antaranya Selorejo, Wates, Doko, Binangun, Panggungrejo, Nglebok, Gandusari, Wonodadi, serta sejumlah daerah perbatasan dengan kabupaten lain.

“Pemberantasan rokok ilegal memang menjadi tugas pokok kami. Karena itu pengawasan terus diperkuat melalui operasi dan sosialisasi,” katanya.

Untuk meningkatkan efektivitas sosialisasi, Satpol PP juga menggandeng Kakanda atau Kader Penegak Perda. Saat ini Kakanda telah dibentuk di Kecamatan Kanigoro,

Sanankulon, Ponggok, dan Kademangan.

Melalui program tersebut, Satpol PP berupaya merangkul generasi muda, termasuk organisasi Karang Taruna, agar ikut berperan aktif dalam pengawasan peredaran rokok ilegal di lingkungan masing-masing.

“Kakanda diharapkan dapat membantu memberikan informasi apabila menemukan indikasi peredaran rokok ilegal. Mereka juga diberikan pemahaman terkait ciri-ciri rokok ilegal, seperti rokok tanpa pita cukai, pita cukai palsu, maupun pelanggaran lainnya,” terang Hangga.

Selama periode Januari hingga September 2026, hasil operasi gabungan berhasil mengamankan sedikitnya 36.400 batang rokok ilegal dari berbagai lokasi.

Ke depan, Satpol PP Kabupaten Blitar berencana menyinkronkan program sosialisasi dengan Bea Cukai agar semakin efektif. Selain sosialisasi tatap muka, berbagai inovasi lain juga tengah disiapkan, termasuk kegiatan berbasis digital dan lomba-lomba kreatif yang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Harapannya, pendekatan yang lebih menarik dan sesuai perkembangan digital dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga peredaran rokok ilegal semakin berkurang,” pungkas Hangga.(Ais/Dya)

Dugaan Korupsi ATR/BPN, KPK Geledah Kanwil Jatim

Pengusutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dugaan suap dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meluas ke Jawa Timur. Setelah menggeledah Kantor Pertanahan Kota Mojokerto dan menemukan sejumlah amplop berisi uang, penyidik pada Kamis (24/9/2026) menyasar Kantor Wilayah BPN Jawa Timur di Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60, Surabaya.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penggeledahan tersebut. Menurut dia, kegiatan itu merupakan bagian dari rangkaian penyidikan perkara yang sebelumnya bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14

September 2026. “Hari ini, Kamis (24/9/2026), penyidik kembali melakukan giat penggeledahan. Hari ini dilakukan di Kanwil BPN Jawa Timur,” kata Budi.

Hingga Kamis siang, penggeledahan masih berlangsung. “Saat ini penggeledahan masih berlangsung. Kami akan sampaikan setiap perkembangannya, sebagai bentuk komitmen KPK dalam melaksanakan proses hukum secara transparan,” ujarnya.

Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas penyidik berlangsung tertutup. Sejumlah petugas keamanan berjaga di depan kantor. Awak media diminta menunggu di luar area setelah penyidik KPK melakukan pemeriksaan di dalam gedung. Sekitar pukul 15.47

WIB, sebuah Honda Jazz abu-abu terlihat berada di depan pintu masuk.

Sejumlah orang kemudian membuka bagasi mobil dan memasukkan beberapa barang. Salah seorang di antaranya terlihat mengenakan rompi berwarna krem. DetikJatim juga melaporkan dua petugas KPK berada di area kantor dan dua personel Brimob Polda Jawa Timur berjaga selama proses penggeledahan.

Penggeledahan di Surabaya dilakukan sehari setelah penyidik menyasar Kantor Pertanahan Kota Mojokerto pada Rabu (23/9). Dari kantor tersebut, KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Yang menarik perhatian, penyidik juga

mengamankan sejumlah amplop berisi uang.

Budi mengatakan uang tersebut diduga merupakan uang yang diterima dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan BPN Kota Mojokerto. “Uang-uang tersebut masih tersimpan dalam amplop, nantinya tentu akan dilakukan penghitungan oleh penyidik,” kata Budi.

Belum ada angka resmi mengenai total uang yang disita dari Mojokerto. KPK masih melakukan penghitungan terhadap uang yang ditemukan dalam amplop tersebut. Karena itu, temuan tersebut belum dapat disimpulkan sebagai bagian dari nilai uang yang sebelumnya disita dalam OTT. KPK baru menyebut uang itu diduga berkaitan dengan penerimaan dari pemohon layanan pertanahan.(wid,ist,kum/dya)

Kekeringan di Kabupaten Malang Meluas ke 12 Desa



MALANG- Kekeringan di Kabupaten Malang terus meluas. Hingga Rabu (23/9/2026), ada 12 desa di 6 kecamatan yang telah mendapatkan distribusi air bersih BPBD total mencapai 2,65 juta liter sejak 8 Agustus 2026.

"Secara kumulatif, total distribusi air bersih BPBD Kabupaten Malang sejak 8 Agustus hingga 23 September 2026 mencapai 2.653.000 liter," ujar Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, dikonfirmasi

melalui pesan singkat, Kamis (24/9/2026)

Disebutkannya, air bersih disalurkan ke sejumlah wilayah terdampak, di antaranya Desa Sumberagung dan Puskesmas Sitiarjo di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Tumpakrejo di Kecamatan Gedangan, Desa Karangates di Kecamatan Sumberpucung, Desa Sumberoto di Kecamatan Donomulyo, Desa Putukrejo dan Arjosari di Kecamatan Kalipare, serta Desa Sumberejo di Kecamatan Pagak.

"Pendistribusian air bersih terus dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan laporan kebutuhan dari tim di lapangan. Dalam satu hari, pada 23 September 2026, tim di lapangan sudah mendistribusikan sebanyak 104.600 liter air bersih. Menggunakan enam armada dengan total 20 rit," kata Purwoto.

Selama pelaksanaan sejak awal Agustus, penyaluran air bersih dengan jumlah tertinggi tercatat di Kecamatan

Sumbermanjing Wetan dengan total 1.045.000 liter. Air bersih tersebut disalurkan ke Desa Sumberagung sebanyak 370.000 liter, Desa Sitiarjo 235.000 liter, Puskesmas Sitiarjo 185.000 liter, dan Desa Kedungbanteng sebanyak 255.000 liter.

Selanjutnya, Kecamatan Gedangan menerima 405.000 liter untuk Desa Tumpakrejo. Di Kecamatan Sumberpucung, distribusi air bersih ke Desa Karangates mencapai 736.300 liter.

Sementara itu, BPBD telah menyalurkan 247.200 liter air bersih ke Desa Sumberoto, Kecamatan Donomulyo.

Di Kecamatan Kalipare, distribusi dilakukan ke Desa Kalirejo sebanyak 53.700 liter, Desa Sumberpetung 25.000 liter, Desa Putukrejo 15.000 liter, dan Desa Arjosari 5.000 liter.

Adapun di Kecamatan Pagak, air bersih disalurkan ke Desa Sumberejo sebanyak 100.000 liter dan Desa Pagak sebanyak 20.800 liter.

Purwoto mengatakan, penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih. BPBD juga terus melakukan pemantauan kondisi di berbagai wilayah untuk mengetahui kebutuhan penanganan di lapangan.

Menurutnya, tim yang bertugas di lapangan dibagi menjadi 2 shift sehingga tetap siaga selama 24 jam. Pemantauan dilakukan di 33 kecamatan melalui berbagai saluran komunikasi, mulai dari radio komunikasi repeater VHF/UHF, internet, SMS, WhatsApp, hingga call center BPBD.

"Setiap hari, tim di lapangan yang sudah terbagi menjadi dua shift sehingga selalu siaga 24 jam, selalu melaksanakan kegiatan monitoring di 33 kecamatan," kata Purwoto.

Dalam penanganan kekeringan tersebut, BPBD Kabupaten Malang juga melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya PMI Kabupaten Malang, Damkar Kabupaten Malang, PJT I Karangates, Perumda Tirta Kanjuruhan, AMCF, perangkat desa setempat, Puskesmas Sitiarjo, Buana Solusindo, dan Marva Telekomunikasi.

Purwoto menyebut keterlibatan berbagai pihak diperlukan karena penanganan dampak kekeringan tidak dapat dilakukan BPBD seorang diri. "Alhamdulillah karena kami tentu tidak bisa melakukan upaya penanganan sendiri, kami dibantu dan melibatkan sejumlah pihak dalam penanganan di lapangan," pungkasnya. (Santi/Dya)

Capaian IKD Kota Malang Diproyeksi Tembus 70% di Akhir Tahun

MALANG- Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Malang diklaim telah melampaui target nasional. Capaian yang kini mendekati 40 persen tersebut diproyeksikan dapat menembus 70 persen hingga akhir 2026, seiring semakin banyaknya masyarakat yang membutuhkan IKD untuk mengakses berbagai layanan publik.

"Inshaallah sekarang hampir 40 persen. Sebelumnya sekitar 26 persen. Kalau target nasional 30 persen, kami sudah 40 persen," ujar Kepala Dispendukcapil Kota Malang, Dahliana Lusi Ratnasari, Kamis (24/9/2026).

Menurutnya, peluang peningkatan aktivasi IKD masih terbuka hingga akhir Desember 2026. Perlinsos tahap kedua menjadi salah satu faktor yang berpotensi mendorong masyarakat melakukan aktivasi IKD, di samping kebutuhan untuk mengakses berbagai layanan publik.

Dengan kondisi tersebut, Lusi memperkirakan capaian aktivasi IKD Kota Malang setidaknya dapat berada di kisaran 50 persen pada akhir tahun.

Bahkan, katanya, capaian tersebut berpotensi lebih tinggi apabila pola peningkatan aktivasi pada pelaksanaan Perlinsos tahap pertama kembali terjadi. "Kalau saya memproyeksikan mungkin bisa menjadi sekitar 50 persen. Tetapi kalau pergerakannya bisa sama seperti yang tahap I, mungkin juga bisa menjadi 60-70 persen," katanya.

Peningkatan aktivasi IKD, lanjut Lusi, tidak hanya dipengaruhi oleh program tertentu. Kesadaran masyarakat terhadap fungsi dan manfaat IKD juga semakin meningkat, sehingga warga mulai melakukan aktivasi secara mandiri.

Pada hal, menurutnya Dispendukcapil Kota Malang telah melakukan sosialisasi dan layanan jemput bola untuk mendorong aktivasi IKD sejak sekitar dua tahun lalu. Pada periode awal, upaya tersebut belum menghasilkan peningkatan sebesar saat ini karena pemahaman masyarakat mengenai manfaat IKD masih terbatas.

Salah satu momentum yang kemudian turut mendorong

peningkatan aktivasi adalah pendaftaran Perlinsos Digital. Dalam pelaksanaannya, Dispendukcapil tidak bergerak sendiri, tetapi melibatkan perangkat daerah (PD) lainnya untuk mendorong masyarakat melakukan aktivasi IKD. "Karena kami tidak bisa bergerak sendiri, harus gerak bersama," katanya.

Di sisi lain, Lusi menjelaskan, angka capaian IKD hampir 40 persen tersebut menggunakan basis penghitungan yang telah mengalami perubahan. Sebelumnya, capaian aktivasi dihitung berdasarkan seluruh penduduk wajib KTP.

Namun, setelah adanya revisi dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, basis penghitungan disesuaikan dengan karakteristik IKD yang membutuhkan perangkat smartphone untuk melakukan aktivasi.



Dengan basis penghitungan seluruh wajib KTP, capaian aktivasi IKD Kota Malang saat ini masih berada di kisaran 19 persen. Sementara dengan basis penghitungan baru, yakni masyarakat berusia minimal 17 tahun yang mendaftarkan NIK menggunakan smartphone, capaian Kota Malang disebut telah mendekati 40 persen. (Santi/Dya)



Presiden AS Donald Trump, Ibu Negara AS Melania Trump, Presiden China Xi Jinping, dan istrinya Peng Liyuan memeriksa barisan pasukan kehormatan saat tiba menjelang kunjungan kenegaraan di Joint Base Andrews, Maryland, Amerika Serikat, Rabu (23/9/2026) waktu setempat.(rtr:ist)

TRUMP-XI BERTEMU, PERANG DAGANG DAN AI JADI AGENDA UTAMA

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyambut Presiden China Xi Jinping di Joint Base Andrews, Maryland, Rabu (23/9/2026) waktu setempat. Sehari kemudian, Kamis (24/9), kedua pemimpin dijadwalkan bertemu di Gedung Putih dengan agenda yang mencakup perdagangan, kecerdasan buatan (AI), mineral kritis, Taiwan, hingga perang Iran.

Pertemuan ini berlangsung ketika Washington dan Beijing berusaha mempertahankan stabilitas hubungan setelah perang dagang yang sempat membuat tarif kedua negara melampaui 100 persen. Pada saat yang sama, persaingan teknologi, khususnya AI dan semikonduktor, justru semakin tajam.

Reuters menggambarkan pertemuan tersebut lebih sarat simbolisme daripada terobosan besar, dengan kedua pemimpin sama-sama berkepentingan menunjukkan bahwa hubungan tetap terkendali meski rivalitas strategis belum berakhir.

Xi tiba di Washington untuk kunjungan kenegaraan selama tiga hari. Ini merupakan kunjungan pertamanya ke Washington dalam lebih dari satu dekade dan pertemuan ketiganya dengan Trump sejak presiden AS itu kembali ke Gedung Putih. Keduanya terakhir bertemu di Beijing pada Mei 2026.

Penyambutan Xi dilakukan dengan seremoni militer. Trump dan Ibu Negara Melania Trump menyambut Xi dan istrinya, Peng Liyuan, di landasan. Dua pesawat pengebom B-1 melintas ketika band Angkatan Udara AS memainkan lagu kebangsaan kedua negara. Xi juga mendapat penghormatan 21 dentuman meriam dan sambutan bunga dari anak-anak Amerika, menurut kantor berita pemerintah China, Xinhua.

Reuters mencatat Trump

menyambut Xi secara langsung di Joint Base Andrews, sebuah gestur protokoler yang menunjukkan pentingnya kunjungan tersebut. Namun, klaim sebelumnya bahwa tidak ada presiden AS yang menyambut pemimpin asing di pangkalan itu sejak 1962 perlu dihindari. Reuters mencatat penyambutan terhadap Xi merupakan yang pertama oleh presiden AS dalam 11 tahun, setelah Presiden Barack Obama menyambut Paus Fransiskus pada 2015.

Di balik seremoni tersebut, persoalan yang dibawa kedua negara jauh lebih konkret. Washington menginginkan kemajuan perdagangan dan sejumlah komitmen ekonomi dari Beijing. China, di sisi lain, memiliki kepentingan untuk mempertahankan akses terhadap teknologi AS sekaligus mengurangi tekanan terhadap ekspor mineral kritis dan teknologi strategis.

Gencatan Diperpanjang

Salah satu perkembangan paling penting menjelang pertemuan Trump-Xi adalah kesepakatan memperpanjang gencatan perang dagang.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Washington dan Beijing sepakat memperpanjang gencatan hingga 10 Januari 2027. Gencatan sebelumnya dijadwalkan berakhir pada 10 November 2026.

Perpanjangan dua bulan tersebut memberikan ruang bagi kedua negara untuk merundingkan kesepakatan

perdagangan yang lebih luas.

Bessent menyebut perpanjangan tersebut bukan tujuan akhir. Washington dan Beijing masih mengupayakan kesepakatan yang lebih besar setelah pembicaraan dengan Wakil Perdana Menteri China He Lifeng.

Gencatan itu berawal dari kesepakatan setelah pertemuan Trump dan Xi di Korea Selatan tahun lalu. Kesepakatan tersebut menghentikan sementara eskalasi tarif antara dua ekonomi terbesar dunia. Sebagai bagian dari kesepakatan, AS menurunkan sebagian tarif terhadap produk China, sementara Beijing melonggarkan pembatasan ekspor mineral tanah jarang.

Perang dagang sebelumnya berlangsung dengan saling menaikkan tarif. Reuters mencatat tarif timbal balik sempat melampaui 100 persen dan mengancam rantai pasok global. Kini kedua negara memilih menurunkan eskalasi tarif secara luas, tetapi persaingan tetap berlangsung melalui pembatasan teknologi, daftar hitam perusahaan, dan kontrol terhadap produk tertentu.

Karena itu, perpanjangan gencatan bukan berarti perang dagang telah selesai. Kesepakatan tersebut lebih tepat dilihat sebagai jeda untuk mencegah eskalasi kembali sembari kedua negara menyelesaikan persoalan yang belum tuntas.

Reuters melaporkan Trump masih menginginkan sejumlah hasil ekonomi yang bisa ditunjukkan kepada publik Amerika. Salah satu isu yang dibicarakan adalah pembelian produk pertanian AS dan pesawat Boeing oleh China. Washington juga menginginkan Beijing mengurangi hambatan perdagangan non-tarif.

China sebelumnya berkomitmen meningkatkan pembelian produk pertanian Amerika. Reuters melaporkan AS juga berharap ada kemajuan terkait komitmen China membeli pesawat Boeing. Namun, CEO Boeing Kelly Ortberg disebut meredam ekspektasi mengenai kemungkinan pesanan besar baru dalam pertemuan Trump-Xi.

Dengan demikian, isu perdagangan yang dibawa ke Gedung Putih bukan hanya tarif. Pertanian, pesawat, hambatan non-tarif, mineral kritis, dan akses pasar menjadi bagian dari negosiasi yang lebih luas.

Persaingan AI

Jika tarif merupakan warisan langsung perang dagang, AI menjadi salah satu arena baru persaingan Amerika Serikat dan China.

Kedua negara sama-sama melihat AI sebagai teknologi strategis yang berpengaruh terhadap ekonomi, keamanan nasional, dan kemampuan militer. Washington membatasi akses China terhadap sejumlah chip AI canggih, sementara Beijing berusaha memperkuat kemampuan domestiknya dan menentang apa yang disebutnya sebagai upaya AS memonopoli teknologi tersebut.

Namun, di tengah persaingan tersebut, Washington dan Beijing mulai membahas mekanisme untuk mengurangi risiko AI.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan Amerika Serikat mengusulkan "notification mechanism" untuk memberi tahu kedua negara apabila terjadi insiden AI yang berpotensi memengaruhi keamanan nasional. Proposal itu dibahas Bessent bersama Wakil Perdana Menteri China He Lifeng dalam perundingan di New York pada akhir pekan sebelum pertemuan Trump-Xi.

Bessent mengatakan: "Kami menginginkan visi bersama mengenai tujuan dan ancaman yang sama."

Ia juga menilai transparansi antara dua kekuatan AI terbesar dunia penting untuk mengurangi risiko yang muncul dari teknologi tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio kemudian menyebut muncul gagasan mengenai jalur komunikasi khusus untuk menghadapi insiden AI. Seperti hotline pada masa Perang Dingin, untuk mencegah insiden yang dapat berdampak terhadap ekonomi dan masyarakat hingga berpotensi memicu konflik antarnegara. (tin,rtr,cna,ist/dya)

Usir Laba-laba dari Rumah dengan Bahan di Dapur

Sarang laba-laba di sudut plafon, dinding, belakang furnitur, atau sela-sela jendela memang kerap membuat rumah terlihat kurang terawat. Apalagi jika sarang mulai muncul di beberapa sudut sekaligus.

Membersihkan sarangnya sebenarnya cukup mudah. Namun, persoalan biasanya tidak berhenti di sana. Jika celah masuk dan kondisi yang membuat rumah menarik bagi laba-laba tidak diperbaiki, hewan berkaki delapan ini bisa kembali.

Laba-laba sebenarnya bukan selalu hama yang perlu dibasmi. University of Minnesota Extension menyebut laba-laba justru membantu mengendalikan populasi serangga karena memangsa berbagai jenis serangga. Sebagian besar laba-laba juga tidak agresif terhadap manusia dan kasus gigitannya jarang. Karena itu, pengendalian di rumah lebih diarahkan untuk mengurangi keberadaannya, bukan membuat rumah benar-benar bebas laba-laba.

Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk membuat rumah kurang menarik bagi laba-laba.

Tutup Celah yang Menjadi Jalan Masuk

Laba-laba dapat masuk melalui celah kecil di sekitar pintu, jendela, dinding, maupun bagian fondasi rumah. Karena itu, periksa bagian rumah yang berhubungan langsung dengan area luar. Jika terdapat celah, tutup menggunakan sealant atau bahan penutup yang sesuai.

Perhatikan pula kondisi karet atau penyekat di bagian bawah pintu. University of Minnesota Extension merekomendasikan menutup celah di sekitar fondasi, pintu, dan jendela lantai dasar. Layar jendela yang rusak juga sebaiknya diperbaiki atau diganti.

Pakar pengendalian hama Jordan Foster dari Fantastic Service, seperti dikutip Mirror, menyarankan pemilik rumah memberi perhatian pada area seperti dapur, loteng, dan kamar mandi.

Ventilasi juga dapat dilengkapi dengan jaring agar menjadi penghalang tambahan. Sementara itu, bagian perapian sebaiknya ditutup ketika sedang tidak digunakan. Menutup celah juga bukan hanya soal laba-laba. Pengendalian hama terpadu pada rumah umumnya menyarankan pemilik rumah menutup berbagai bukaan, menjaga kebersihan dan kerapian, serta mengurangi kondisi yang dapat menarik hama.

Coba Minyak Esensial Peppermint

Aroma tertentu kerap digunakan sebagai cara alami untuk membuat laba-laba menjauh. Salah satunya peppermint.

Melansir dari Mirror, sekitar 20 tetes minyak esensial peppermint dicampurkan dengan air ke dalam botol semprot. Campuran tersebut kemudian dapat disemprotkan pada sudut ruangan, celah, atau area yang sering menjadi tempat laba-laba muncul.

Namun, efektivitas minyak esensial perlu dilihat secara lebih hati-hati. Penelitian yang terbit di jurnal Behavioural Processes pada 2025 menemukan sejumlah minyak esensial memiliki efek mengusir pada laba-laba serigala (*Pardosa hortensis*). Minyak yang menunjukkan efek tersebut dalam penelitian itu antara lain catnip, cedarwood, cinnamon, citronella, dan clove. Peneliti juga mencatat bahwa hasil tersebut masih perlu diuji pada berbagai spesies laba-laba dan kondisi lapangan yang berbeda.

Artinya, minyak esensial dapat dicoba sebagai langkah tambahan, tetapi tidak sebaiknya dianggap sebagai solusi yang pasti berhasil untuk semua jenis laba-laba.

Gunakan Lilin Aromaterapi

Lilin aromaterapi dengan aroma serai, lemon, atau kayu manis juga bisa menjadi pilihan untuk area tertentu, misalnya dekat jendela atau sudut ruangan yang sering ditemukan sarang. Namun, cara ini sebaiknya dipandang sebagai upaya tambahan, bukan metode utama pengendalian laba-laba.

Bukti ilmiah
mengenai efek aroma terhadap

laba-laba berbeda-beda bergantung pada jenis minyak, konsentrasi, dan spesies laba-laba. Jika menggunakan lilin, letakkan di permukaan yang stabil dan jauh dari tirai, kertas, furnitur, atau benda lain yang mudah terbakar. Jangan meninggalkan lilin menyala tanpa pengawasan. Setelah selesai digunakan, pastikan api benar-benar padam.

Semprotkan Campuran Cuka Putih

Bahan lain yang mudah ditemukan di dapur adalah cuka putih. Dalam tips yang dikutip detikProperti dari Mirror, cuka putih dapat dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1:1, lalu dimasukkan ke dalam botol semprot.

Campuran tersebut dapat digunakan pada celah atau area yang kerap menjadi tempat laba-laba masuk. Aroma cuka disebut dapat membuat area tersebut kurang menarik bagi laba-laba.

Namun, cuka tetap merupakan cairan asam sehingga penggunaannya perlu diperhatikan. Jangan langsung menyemprotkannya pada permukaan yang sensitif terhadap asam, seperti sebagian jenis batu alam atau material tertentu. Uji terlebih dahulu pada bagian kecil yang tidak mencolok dan pastikan ruangan memiliki ventilasi yang baik. Selain menggunakan bahan sederhana, cara yang lebih penting justru menjaga rumah tetap bersih dan mengurangi tempat persembunyian laba-laba.

University of Minnesota Extension merekomendasikan membersihkan sarang menggunakan sapu atau penyedot debu, terutama di sekitar jendela, sudut ruangan, dan tempat yang jarang terganggu. Kantong, kardus, tumpukan barang, serta benda-benda yang menumpuk juga sebaiknya dikurangi karena dapat menyediakan tempat persembunyian. (farist/dya)

Bahaya Laba-laba di Rumah

Risiko gigitan

Sebagian kecil spesies laba-laba dapat menggigit manusia. Namun, sebagian besar laba-laba rumahan tidak agresif dan gigitan pada manusia relatif jarang.

Reaksi pada kulit

Gigitan dapat menyebabkan nyeri, kemerahan, bengkak, atau rasa gatal. Tingkat reaksinya bergantung pada spesies laba-laba dan kondisi orang yang tergigit.

Risiko reaksi yang lebih serius

Pada kasus tertentu, gigitan spesies berbisa dapat menimbulkan gejala yang lebih berat sehingga membutuhkan pertolongan medis.

Sarang membuat rumah terlihat kotor

Jaring laba-laba yang menumpuk di sudut plafon, dinding, jendela, atau belakang furnitur dapat membuat rumah tampak tidak terawat.



Ubur-Ubur Seukuran Bus Terekam di Wales, Tentakelnya 36 M

Sseekor ubur-ubur raksasa terekam kamera penyelam di perairan dekat Pantai Trefin, Pembrokeshire, Wales. Ukurannya diperkirakan mencapai 10-15 meter jika dihitung dari tubuh hingga tentakelnya yang menjuntai di dalam air.

Penampakan ini terjadi ketika Iestyn Morgan, penyelam bebas berusia 21 tahun sekaligus aktivis konservasi, sedang berenang di perairan Wales. Morgan awalnya hanya melihat beberapa tentakel yang bergerak di dalam air. Namun, semakin ia mendekat, semakin banyak tentakel yang terlihat.

Morgan sempat mengira hewan itu merupakan ubur-ubur kompas (*Chrysaora hysoscella*), spesies yang umum ditemukan di perairan Inggris. Dugaan tersebut berubah setelah ia menyadari ukuran hewan yang berada di hadapannya jauh lebih besar.

"Panjangnya pasti sama dengan bus atau gerbong kereta. Aku tidak percaya betapa besarnya itu," ujar Morgan.

Hewan yang direkam Morgan ternyata merupakan ubur-ubur surai singa (*Cyanea capillata*), salah satu spesies ubur-ubur terbesar yang dikenal ilmu pengetahuan.

Nama surai singa merujuk pada kumpulan tentakel panjang yang mengelilingi bagian bawah tubuhnya. Dari kejauhan, tentakel tersebut menyerupai rambut atau surai yang mengembang di dalam air. Ukuran tubuh utama atau lonceng ubur-ubur

ini dapat mencapai sekitar 3 meter pada individu berukuran besar. Namun, bagian yang membuatnya luar biasa panjang adalah tentakelnya.

Tentakel surai singa dapat menjulur hingga lebih dari 30 meter. Catatan untuk spesies ini mencapai sekitar 36,5 meter, membuatnya kerap disebut sebagai salah satu hewan terpanjang di Bumi. Smithsonian juga mencatat individu langka dengan tentakel lebih dari 30 meter.

Dengan struktur sepanjang itu, ukuran seekor surai singa tidak bisa hanya dinilai dari diameter tubuhnya. Sebagian besar panjangnya justru tersembunyi di balik tentakel yang tipis dan sulit dilihat.

Hal itu pula yang membuat pengalaman Morgan terasa tidak biasa. Ia mengatakan jumlah tentakel yang awalnya hanya beberapa kemudian terlihat semakin banyak. Tentakel tersebut bahkan menjulur hingga melewati batas penglihatannya di dalam air.

Ahli biologi kelautan dari University of Southampton, Dr Cathy Lucas, mengatakan rekaman Morgan memperlihatkan betapa panjangnya tentakel surai singa. Menurut dia, tentakel hewan ini sangat tipis sehingga penyelam bisa saja tidak menyadarinya ketika berada di dalam air.

Di balik penampilannya yang mengesankan, surai singa tetap perlu dihindari. Tentakelnya dilengkapi sel penyengat yang digunakan untuk menangkap mangsa. Lucas mengingatkan bahwa tentakel tersebut dapat menyengat

meskipun tidak terlihat jelas. Bahkan bagian tentakel yang sudah terputus dari tubuh ubur-ubur masih dapat menyebabkan sengatan.

Meski terasa menyakitkan, Lucas menegaskan sengatan surai singa di wilayah tersebut tidak dianggap mematikan. Karena itu, langkah paling aman bagi penyelam maupun wisatawan adalah tidak menyentuh hewan tersebut.

Jika terkena tentakel, Lucas menyarankan agar bagian yang menempel pada kulit disingkirkan menggunakan benda seperti tongkat, bukan dengan tangan kosong, kemudian area yang terkena dicuci menggunakan air hangat.

Laut Jadi Lebih Hangat

Kemunculan surai singa di Wales menjadi semakin menarik karena Morgan juga mengamati keberadaan spesies lain yang biasanya berasosiasi dengan perairan lebih hangat.

Beberapa minggu sebelum merekam ubur-ubur tersebut, ia mengatakan kameranya menangkap ikan triggerfish, spesies yang berasal dari kawasan Mediterania. Pengamatan semacam ini membuat Morgan tertarik mendokumentasikan perubahan komposisi biota di perairan sekitar Wales.

Sejumlah laporan mengenai penampakan surai singa di Wales juga mencatat bahwa spesies tersebut sesekali muncul di kawasan itu pada akhir musim panas dan musim gugur. Namun,

satu penampakan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perubahan iklim menjadi penyebab langsung kemunculan individu tertentu. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **SIDOARJO:** TEGUH A | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** AIS | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **TRENGGALEK:** HERLAMBAH | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

WEDGES, SEPATU 'JADUL' YANG KEMBALI HITS

Tren mode tidak pernah benar-benar meninggalkan masa lalu. Model yang sempat dianggap ketinggalan zaman bisa kembali muncul setelah beberapa tahun, termasuk sepatu wedges.

Sepatu dengan sol tebal yang menyatu dari bagian depan hingga tumit ini kembali mendapat perhatian. Wedges menawarkan tambahan tinggi seperti high heels, tetapi dengan bidang sol yang lebih luas sehingga terasa lebih stabil ketika digunakan.

Dibandingkan stiletto atau sepatu berhak tipis, wedges memberikan permukaan pijakan yang lebih besar. Namun, bukan berarti semua wedges otomatis lebih nyaman atau lebih aman bagi kaki. Bentuk, tinggi, bobot, ukuran, dan lama pemakaian tetap menentukan.

Dari Sol Gabus Ferragamo

Wedges memiliki sejarah panjang dalam dunia mode modern. Salah satu tokoh yang berperan besar dalam memopulerkannya adalah desainer Italia Salvatore Ferragamo pada dekade 1930-an.

Ferragamo mengembangkan sepatu dengan sol berbentuk baji atau wedge ketika bahan baku untuk pembuatan sepatu sedang sulit diperoleh. Gabus menjadi salah satu material yang digunakan untuk

membuat sol tebal dan ringan. Model tersebut kemudian berkembang dan menjadi bagian dari berbagai tren mode. Pada era 1970-an, wedges semakin lekat dengan gaya busana yang berani, termasuk estetika platform shoes dan busana bergaya bohemian. Setelah mengalami pasang surut popularitas, wedges kembali muncul dalam berbagai koleksi mode modern.

Bentuknya pun tidak lagi terbatas pada sandal atau sepatu formal. Ada wedges berbentuk sneakers, sandal kasual, espadrilles, hingga sepatu yang dipadukan dengan busana kerja.

Kembalinya wedges tidak bisa dilepaskan dari siklus mode. Tren fesyen pada beberapa tahun terakhir banyak menghidupkan kembali estetika dari dekade sebelumnya. Gaya Y2K, retro, vintage, hingga elemen mode 1970-an kembali diterjemahkan dalam desain kontemporer.

Wedges cocok dengan kecenderungan tersebut karena memiliki siluet yang langsung mengingatkan pada era ketika sepatu berplatform dan sol tebal menjadi bagian penting dari gaya berpakaian.

Namun, desain modern membuat wedges lebih mudah dipadukan. Sepatu ini dapat dikenakan bersama celana jeans, celana panjang berpotongan lebar, rok, maupun gaun. Model dengan warna netral dapat digunakan untuk

tampilan sehari-hari, sedangkan desain dengan detail atau warna mencolok dapat menjadi pusat perhatian dalam sebuah penampilan. Dengan kata lain, wedges kini tidak harus dibaca sebagai sepatu formal atau sepatu bergaya retro.

Jawabannya tidak sesederhana itu.

Secara desain, wedges memiliki keunggulan karena seluruh atau sebagian besar bagian bawah kaki mendapatkan dukungan dari sol. Pada stiletto, sebagian besar berat tubuh bertumpu pada area yang jauh lebih kecil di bawah tumit.

Wedges juga dapat membuat pengguna merasa lebih stabil karena bagian depan dan belakang sepatu sama-sama memiliki ketinggian. Namun, semakin tinggi sol, semakin besar pula perubahan posisi khaki.

American Podiatric Medical Association mengingatkan bahwa sepatu dengan hak tinggi dapat meningkatkan tekanan pada bagian depan kaki dan mengubah posisi alami khaki.

Risiko tersebut dipengaruhi oleh tinggi hak, bentuk sepatu, serta lamanya digunakan. Karena itu, wedges yang sangat tinggi tidak otomatis menjadi pilihan yang lebih ramah kaki dibandingkan heels yang lebih rendah.

Bahkan, wedges dengan sol yang sangat tebal dan kaku dapat mengurangi fleksibilitas alami kaki ketika berjalan.

Tinggi Bukan Satu-satunya Pertimbangan

Jika ingin menggunakan wedges untuk aktivitas sehari-hari, ukuran dan konstruksi sepatu menjadi faktor penting.

Sepatu sebaiknya tidak terlalu sempit pada bagian depan. Jari-jari kaki membutuhkan ruang untuk bergerak dan tidak seharusnya

terjepit. Bobot sepatu juga patut diperhatikan. Wedges dengan sol sangat tebal tetapi berat dapat membuat kaki bekerja lebih keras ketika berjalan.

Kemudian ada faktor ketinggian.

Wedges dengan kenaikan tinggi yang lebih rendah umumnya lebih mudah digunakan untuk aktivitas sehari-hari dibandingkan model dengan sol sangat tinggi.

Untuk pemakaian dalam waktu lama, pengguna juga sebaiknya memperhatikan apakah kaki mulai terasa nyeri, mati rasa atau muncul lecet. Jika keluhan muncul, mengganti sepatu atau mengurangi durasi pemakaian lebih baik daripada memaksakan diri demi tampilan.

Gaya Retro yang Kembali

Popularitas wedges menunjukkan satu hal sederhana dalam dunia mode: tren lama tidak selalu benar-benar mati. Yang berubah adalah cara memakainya.

Jika pada masa lalu wedges identik dengan gaya tertentu, kini desainnya jauh lebih fleksibel. Model yang lebih minimalis dapat masuk ke gaya smart casual, sementara wedges dengan sol besar dapat melengkapi tampilan retro atau street style.

Sepatu ini juga menawarkan kompromi visual bagi orang yang ingin mendapatkan efek tubuh terlihat lebih tinggi tanpa menggunakan hak tipis. Tetapi pilihan antara wedges dan heels pada akhirnya bukan sekadar persoalan tren.

Keduanya memiliki karakter berbeda. Heels dengan hak terpisah memberikan siluet yang lebih ramping, sementara wedges menawarkan bentuk sol yang lebih menyatu dan pijakan yang berbeda. Jadi, jika wedges kembali muncul di rak toko dan lini koleksi terbaru, itu bukan sekadar nostalgia.

Sepatu yang sempat dijuluki dated shoes kini tengah menikmati masa kebangkitannya lewat berbagai interpretasi baru yang segar. Meski tetap mempertahankan garis siluet klasik dan elemen nostalgia khas masa lalu, desainnya telah disesuaikan secara cermat agar relevan dengan gaya hidup modern. Sentuhan pembaruan ini tidak hanya berfokus pada estetika yang lebih relevan dengan tren streetwear dan fashion masa kini, tetapi juga menyematkan teknologi kenyamanan ekstra sehingga sangat ideal untuk menunjang mobilitas dan aktivitas harian. (far,ist/dya)



Temuan Kamar Mewah didari Hal 1

Tembok lembaga pemasyarakatan semestinya membatasi kebebasan. Namun di balik dinding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Ombudsman Republik Indonesia menemukan kawasan hunian yang jauh berbeda dari blok narapidana pada umumnya.

Ada ruang tamu, kamar tidur, dapur, televisi, kulkas, hingga perlengkapan rumah tangga. Ombudsman menyebut fasilitas itu menyerupai apartemen.

Temuan itu bukan sekadar perkara kemewahan fasilitas. Ombudsman menemukan indikasi bahwa sebagian hunian khusus tersebut ditempati warga binaan yang membayar.

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan pihaknya memperoleh keterangan dari salah seorang yang berada di fasilitas tersebut. Orang itu mengaku membayar untuk bisa menempati hunian. Namun, pemeriksaan belum sampai pada besaran pembayaran karena proses meminta keterangan terhenti ketika petugas lapas datang.

"Iya, bayar. Nah, itu yang tadi tidak terkonfirmasi karena keburu datang petugas," kata Syafrida, seperti dikutip Kamis (24/9/2026).

Ombudsman belum mengetahui siapa penerima pembayaran tersebut. Karena itu, lembaga pengawas pelayanan publik itu belum menyimpulkan adanya praktik korupsi atau menentukan pihak yang bertanggung jawab. Dugaan komersialisasi masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.

Lebih dari 10 Hunian

Temuan tersebut diperoleh ketika Ombudsman melakukan inspeksi mendadak pada Rabu, 23 September. Ini merupakan sidak kedua ke Lapas Cibinong sepanjang 2026. Dalam kunjungan itu, Ombudsman menemukan lebih dari 10 kamar atau bangunan yang tersebar di sejumlah bagian kawasan belakang lapas.

Kawasan tersebut terpisah dari blok hunian warga binaan pada umumnya. Beberapa bangunan tampak seperti rumah atau klaster. Fasilitas di dalamnya antara lain ruang tamu, kamar tidur, ruang makan, dapur, televisi, kulkas, serta berbagai perlengkapan rumah tangga. Ombudsman memperkirakan beberapa bangunan telah berdiri sekitar satu tahun atau lebih, meski waktu pembangunan dan penggunaannya masih didalam.

Anggota Ombudsman Fikri Yasin menggambarkan fasilitas itu sebagai

hunian dengan standar apartemen.

"Bagus, bagus sekali. Standar apartemen. Artinya walaupun kecil-kecil, kelengkapannya semua ada. Kelengkapan alat rumah tangga semua ada," kata Fikri.

Ombudsman juga mendapati sekitar enam sampai tujuh orang yang diduga warga binaan berada secara terpisah di kawasan tersebut. Namun identitas maupun status seluruh orang yang berada di fasilitas itu belum dipastikan.

Karena itu, Ombudsman belum dapat memastikan apakah seluruh hunian tersebut memang ditempati narapidana atau memiliki peruntukan lain.

Syafrida mengatakan dugaan fasilitas khusus itu digunakan warga binaan yang memiliki kemampuan finansial lebih. Ia menyebut Ombudsman belum bisa memastikan apakah penghuni tersebut merupakan narapidana kasus besar.

"Kami tidak bisa memastikan, tapi yang jelas ini bukan hanya yang pembesar. Tetapi ini dimanfaatkan oleh warga binaan yang notabene kemungkinan dugaannya memiliki uang lebih dan dia mau menikmati tempat dia tinggal," ujar Syafrida.

Dugaan Pungutan Rp150 ribu/Pekan

Persoalan lain muncul dari dugaan pungutan terhadap warga binaan. Kanwil Ditjenpas Jawa Barat pada Kamis, 24 September, mengatakan sedang mendalami informasi mengenai pungutan Rp150 ribu per pekan di Lapas Cibinong.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno mengatakan informasi itu baru diperoleh setelah disampaikan Ombudsman. Tim yang dibentuk Ditjenpas bersama Kanwil Ditjenpas Jawa Barat akan memeriksa informasi tersebut.

"Itu juga kami perlu, baru mendapatkan informasi. Tapi nanti tetap semua, apa pun masukan, apa pun temuan, tetap akan kami tindak lanjuti dan kita dalam," kata Yudi.

Pungutan Rp150 ribu per pekan itu belum dinyatakan terbukti. Begitu pula kaitannya dengan hunian khusus belum diketahui. Karena itu, dua persoalan tersebut perlu dipisahkan sampai pemeriksaan Ditjenpas selesai.

Persoalan lain yang menjadi sorotan adalah akses Ombudsman ketika melakukan pemeriksaan.

Ombudsman menyatakan timnya tidak diperbolehkan masuk ketika melakukan sidak pertama pada Juli 2026. Pada sidak kedua, 23 September, tim kembali mengalami hambatan meski membawa surat resmi dan mengenakan atribut lembaga.

Tim akhirnya dapat memasuki kawasan setelah terjadi cekcok dan

aksi saling dorong dengan petugas keamanan. Fikri mengatakan seorang petugas Ombudsman bahkan sempat mengalami kaki terjepit dalam insiden tersebut.

"Tentu kami semakin bertanya, ada apa kok kami dihalang-halangi. Setelah ketemu di sana, ternyata banyak sekali rumah yang diduga narapidana ada di dalam sana," kata Fikri.

Ombudsman kemudian meminta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi tidak hanya diarahkan kepada Lapas Cibinong, tetapi juga sistem pemasyarakatan secara lebih luas.

"Evaluasi yang kami maksud itu menyeluruh, dari mulai regulasi, kemudian terkait sumber daya manusia, dalam hal ini petugas-nya, kalapas-nya, pejabat-nya, itu merupakan bagian yang harus mereka evaluasi," kata Syafrida.

Ombudsman juga menilai perlu ada evaluasi dari hulu sampai hilir, termasuk keberadaan warga binaan yang keluar dari blok dan menempati hunian yang menurut Ombudsman tidak semestinya.

Ombudsman tidak hanya menyampaikan temuan. Lembaga tersebut meminta fasilitas khusus itu dibongkar dalam waktu kurang dari satu bulan.

Ditjenpas: Itu Rumah Dinas

Di sisi lain, Ditjenpas memberikan penjelasan berbeda mengenai bangunan yang ditemukan Ombudsman.

Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno mengatakan kawasan tersebut merupakan lokasi asimilasi yang sebelumnya dikenal sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE). Di dalamnya terdapat sejumlah rumah dinas jabatan.

"Lokasi yang dimaksud oleh Tim Ombudsman adalah lokasi asimilasi, yang dulu namanya SAE, Sarana Asimilasi dan Edukasi. Di sana terdapat beberapa rumah dinas jabatan. Jadi rumah yang didatangi oleh Tim Ombudsman adalah rumah-rumah dinas jabatan yang memiliki SK Rumah Jabatan," kata Yudi.

Menurut Yudi, Ditjenpas masih melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi dan penggunaan bangunan tersebut. Jika ditemukan penggunaan yang tidak sesuai, tindakan akan dilakukan sesuai aturan.

"Adapun jika di area asimilasi tersebut terdapat hal-hal yang tidak semestinya, ini sedang kami dalam oleh tim. Komitmen pimpinan, kami akan lakukan pemeriksaan dan akan kami tindak sesuai aturan secara proporsional," ujarnya.

Dirjen Pemasyarakatan Mashudi

sebelumnya juga mengatakan Ditjenpas telah membentuk tim untuk memeriksa sarana, prasarana, administrasi, standar pelayanan, serta pengamanan Lapas Cibinong. Ia mengatakan temuan Ombudsman akan diverifikasi secara utuh sebelum ditarik kesimpulan.

Kunjungan ke sejumlah lapas oleh tim Ombudsman RI merupakan bagian dari pengawasan, menurut anggota Ombudsman RI, Syafrida Rachmawati.

Sesuai UU Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman adalah lembaga yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk BUMN, BUMD, maupun badan hukum milik negara yang dananya bersumber dari APBN serta APBD.

"Jadi kami punya mandat yang jelas," ujar Syafrida.

Kunjungan pertama ke lapas-lapas di Indonesia, sambungannya dimulai pada 26 Juli lalu bersama beberapa lembaga seperti Komnas HAM, KPAI, LPSK, Komnas Perempuan, dan Komisi Nasional Disabilitas.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra meminta persoalan tersebut dibuka secara terang.

Yusril mempersilakan media melihat langsung kawasan yang menjadi temuan Ombudsman untuk memastikan peruntukan bangunan tersebut.

"Apakah benar ada fasilitas mewah berstandar apartemen di sana. Kalau ada, pastikan fasilitas apa itu, apakah itu rumah pegawai di dalam lapas atau tempat asimilasi napi menjelang bebas atau memang benar itu fasilitas mewah untuk para napi tertentu yang sanggup membayar," kata Yusril.

Yusril mengatakan kementeriannya akan mengambil tindakan jika ditemukan pejabat atau pegawai pemasyarakatan yang terbukti membuat atau mengomersialkan fasilitas khusus bagi narapidana.

Ia juga meminta Ombudsman melakukan klarifikasi apabila terdapat perbedaan persepsi mengenai temuan tersebut.

"Jangan ada dusta di antara kita. Tapi jangan pula ada fitnah di antara kita," kata Yusril.

Sementara, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya baru mengetahui persoalan tersebut dari pemberitaan. Ia kemudian meminta komisi terkait mendalami temuan Ombudsman melalui fungsi pengawasan. (wid,ist,kum,rls/dya)

Fraksi DPRD Jatim Soroti Ruang Fiskal dan Kualitas Belanja RAPBD 2027

SURABAYA – Fraksi DPRD Jawa Timur memberikan sejumlah catatan terhadap Nota Keuangan Gubernur atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2027. Di tengah ruang fiskal yang dinilai semakin terbatas, DPRD menekankan pentingnya memastikan setiap alokasi anggaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan kebutuhan masyarakat dan target pembangunan daerah.

Pandangan umum fraksi tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur, yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono, Kamis (24/9/2026).

Dalam rancangan APBD 2027, pendapatan daerah diproyeksikan sekitar Rp26,41 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai sekitar Rp27,42 triliun. Struktur tersebut menghasilkan defisit sekitar Rp1,02 triliun yang ditutup melalui pembiayaan daerah. Angka belanja ini juga menjadi perhatian karena ruang fiskal yang tersedia harus dibagi untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Deni Wicaksono mengatakan, pandangan umum yang disampaikan masing-masing fraksi diharapkan menjadi bahan dan pegangan bersama dalam menentukan prioritas kebutuhan serta arah kebijakan anggaran.

“Semoga pandangan umum fraksi-fraksi di DPRD Jawa Timur ini dapat menjadi pegangan bagi kita bersama dalam menyusun prioritas kebutuhan dan kebijakan, sehingga APBD yang nantinya ditetapkan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat Jawa Timur,” ungkap Deni.

Menurut Deni, pembahasan APBD tidak berhenti pada persoalan angka pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Lebih dari itu, setiap kebijakan anggaran harus dapat diterjemahkan ke dalam program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Kita berharap kebijakan anggaran ke depan dapat semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat, mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menjawab kebutuhan masyarakat Jawa Timur,” katanya.

Sejumlah fraksi kemudian memberikan catatan dengan penekanan berbeda terhadap struktur RAPBD 2027. Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, menyoroti semakin terbatasnya ruang fiskal dan meminta kualitas belanja menjadi perhatian utama pemerintah daerah.

Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan DPRD, Jatim Martin Hamonangan



mengatakan, RAPBD 2027 perlu dilihat tidak hanya dari sisi kepatuhan administratif, tetapi juga dari kemampuan anggaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“APBD pada hakikatnya bukan hanya kumpulan angka pendapatan, belanja dan pembiayaan. Di balik setiap angka terdapat pilihan kebijakan, terdapat kebutuhan masyarakat, terdapat harapan, sekaligus tanggung jawab yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat,” kata Martin.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti belanja modal yang dalam RAPBD 2027 direncanakan sekitar Rp1,679 triliun atau 6,1 persen dari total belanja. Dalam kondisi fiskal yang lebih terbatas, fraksi meminta pemerintah memastikan setiap pilihan belanja mampu mempertemukan kebutuhan pelayanan dasar dengan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan mempertanyakan penggunaan estimasi SiLPA 2026 sebesar Rp1,5 triliun sebagai sumber pembiayaan. Fraksi meminta dasar perhitungannya realistis agar pelaksanaan APBD 2027 tidak terlalu bergantung pada penerimaan yang belum terbentuk.

Sorotan terhadap kualitas belanja juga disampaikan Fraksi Partai Demokrat. Juru Bicara Fraksi Demokrat DPRD Jatim, M. Naufal Alghifary menilai struktur RAPBD harus mampu menjaga produktivitas masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Menurut Naufal, kualitas belanja, ketepatan prioritas, serta keterukuran target kinerja harus menjadi perhatian utama dalam pembahasan RAPBD 2027.

“Memastikan kualitas belanja daerah, ketepatan prioritas, keterukuran target kinerja, serta keterkaitan yang nyata antara setiap alokasi anggaran dengan hasil dan manfaat yang berdampak nyata bagi masyarakat,” ujar Naufal.

Demokrat juga mencermati target Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2027 yang diproyeksikan sekitar Rp17,7 triliun. Fraksi meminta target tersebut disusun secara realistis dan akuntabel dengan dukungan basis data serta asumsi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sementara itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan sorotan lebih spesifik terhadap belanja modal. Juru Bicara Fraksi PKB DPRD Jatim Salim Azhar mempertanyakan penurunan belanja modal dalam RAPBD 2027 yang hanya dianggarkan sekitar Rp1,678 triliun.

Menurut PKB, angka tersebut turun

sekitar 44,31 persen dibandingkan realisasi belanja modal 2025 yang mencapai sekitar Rp3,014 triliun. Fraksi mempertanyakan apakah penurunan tersebut semata-mata disebabkan keterbatasan ruang fiskal atau juga berkaitan dengan kapasitas pemerintah dalam mengeksekusi belanja modal.

“Apakah penurunan tajam di APBD Murni 2027 ini murni akibat keterbatasan ruang fiskal, ataukah sebenarnya merupakan bentuk pengakuan dosa dan rem darurat atas keterbatasan kapasitas eksekusi?” kata Salim.

Karena itu, PKB meminta pola penganggaran dengan pagu kecil pada APBD murni yang kemudian ditingkatkan melalui perubahan APBD tidak kembali terjadi pada 2027. Menurut fraksi, konsistensi perencanaan dan kesiapan pelaksanaan menjadi penting agar anggaran yang telah ditetapkan dapat benar-benar menghasilkan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

“Cara kerja ‘anggaran kecil di APBD murni, kemudian didongkrak di perubahan’ tidak boleh terulang lagi di tahun 2027,” pungkasnya. (adv,pra/dya)

SELAMAT ULANG TAHUN
LENTERA MEDIA GROUP KE - 9

BLEGUN PRJANGGONO, S.H. Wakil Ketua III DPRD Jatim	DENI WICAKSONO, S.Sos. Wakil Ketua I DPRD Jatim	Drs. M. MUSTAFIK Ketua DPRD Jatim	H. HIDAYAT, S.Ag., M.Si Wakil Ketua II DPRD Jatim	SRI WAHYUNI, S.Kep., Ns Wakil Ketua IV DPRD Jatim
---	--	--	--	--